

PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSISULAWESI SELATAN

Andi Wahana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

email: Andiwahana1411@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the effect of the realization of the value of Foreign Investment (PMA) on economic growth in South Sulawesi Province, to determine and analyze the realization of the value of Domestic Investment (PMDN) on economic growth in South Sulawesi Province, to determine and analyze the influence of economic growth in South Sulawesi Province, and to determine and analyze government spending on economic growth in South Sulawesi Province. The analytical tool used in this research is linear regression analysis with a quantitative model. The results of the study indicate that investment through PMA and PMDN has a positive and significant effect on economic growth in South Sulawesi Province, employment has a positive and significant effect on economic growth in South Sulawesi Province, government spending has a positive and significant effect on economic growth in South Sulawesi Province.

Keywords: Investment, PMA, PMDN, Labor Force, Government Expenditure, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah per-ekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu per-ekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami

pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Untuk memberikan suatu gambaran kasarmengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selaludigunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011).

Berikut ini adalah tabel nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sulawesi Selatan sepuluh tahun terakhir:

Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja,Andi Wahana

Tabel 1.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Tahun	PDRB Harga Konstan (Miliar Rupiah)
2010	51.197,03
2011	55.116,92
2012	59.708,63
2013	64.284,43
2014	234.487,91
2015	251.723,05
2016	270.614,64
2017	290.469,71
2018	310.740,69
2019	330.742,60

Sumber: *BPS Sulawesi Selatan (data diolah), Tahun 2020*

Pada tabel 1, PDRB atas dasar harga konstan di Propinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Hal ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, yang tidak dipengaruhi inflasi. Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah investasi.

Menurut Harrod-Domar, untuk bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomidiperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal (Todaro dan Smith dalam Fauzan, 2015). Sodik dan Nuryadin dalam Fauzan (2015) menyatakan bahwa investasi disepakati menjadi salah satu kata kunci dalam setiap pembicaraan tentang konsep ekonomi. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan

kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama mengingat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh.

Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi khususnya yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta ialah investor yang berasal dari luar negeri (PMA) maupun investor dari dalam negeri (PMDN). Sementara itu, investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di wilayah tersebut. Investasi atau penanaman modal oleh investor dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal oleh pihak

asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Selatan, baik dilihat dari nilai realisasi investasi maupun persentase laju investasi yang terjadi ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2.
Perkembangan Realisasi Investasi dilihat dari Penerimaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Thn	INVESTASI			
	PMA		PMDN	
	Jml Proyek	Realisasi (Milyar Rupiah)	Jml Proyek	Realisasi (Milyar Rupiah)
2010	33	441,80	23	3.212,3
2011	36	89,60	42	3.986,3
2012	29	582,60	34	2.318,9
2013	88	462,80	57	921,0
2014	58	280,90	48	4.949,6
2015	165	233,30	244	9.215,3
2016	309	372,50	365	3.334,6
2017	196	712,80	242	1.969,4
2018	191	617,19	318	3.275,9
2019	239	201,6	132	2.948,7
Total	1.344	3.995,09	1.505	36.132,00

Sumber: *Badan Penanaman Modal (BPM) Indonesia, Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa selama tahun 2010-2019 di Propinsi Sulawesi Selatan tingkat penerimaan investasi dilihat dari Penanaman Modal Asing (PMA) telah terealisasi sebesar 3.995,09 milyar rupiah dengan jumlah proyek 1.344, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 1.505 proyek dengan nilai yang telah terealisasi sebesar 36.132,00 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan telah optimal dalam usaha menarik investor yang dapat mem-berdayakan potensi ekonomi di wilayahnya.

Selain investasi, maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk di-kawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap per-tumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dalam Sari (2016) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota

keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki *skill* akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada

akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja demi menghasilkan barang atau jasa sehingga mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri atau masyarakat. Jadi, tenaga kerja adalah definisi umum yang mencakup penduduk yang punya kemampuan untuk bekerja atau berusia 15 tahun ke atas.

Tabel 3.
Perkembangan Angkatan Kerja di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Tahun	Angkatan Kerja				Sub Jumlah
	Bekerja	%	Pengangguran	%	
2010	3,272,365	9.74	298,952	14.79	3,571,317
2011	3,375,498	10.04	236,926	11.72	3,612,424
2012	3,351,908	9.97	208,983	10.34	3,560,891
2013	3,291,280	9.79	176,912	8.75	3,468,192
2014	3,527,036	10.50	188,765	9.34	3,715,801
2015	1,889,502	5.62	97,748	4.83	1,987,250
2016	3,694,712	10.99	186,291	9.21	3,881,003
2017	3,598,663	10.71	213,695	10.57	3,812,358
2018	3,774,924	11.23	213,105	10.54	3,988,029
2019	3,830,096	11.40	200,304	9.91	4,030,400
Total	33,605,984	100	2,021,681	100	35,627,665

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Sulsel, Tahun 2020

Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa hingga tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk bekerja sebanyak 3.830.096 orang dengan persentase kerja 11,40 %. Kelompok umur yang mendominasi bekerja ada pada kelompok 40-44 tahun. Untuk tingkat pengangguran di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sebanyak 200,304 orang atau

dengan presentasi 9,91 %, kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan manusia di Propinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomian di Propinsi Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak

Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja,Andi Wahana

bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono dalam Rustiono, 2010).

Anaman Dalam Rustiono (2010) menyatakan bahwa

pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (dalam jutaan Rp)

Tahun	PENGELUARAN PEMERINTAH				
	Belanja	%	Belanja	%	Total
	Tidak Langsung		Langsung		Belanja Daerah
2010	6,083,542,332	0.06	5,961,968,304	0.13	12,045,510,636
2011	6,563,176,860	0.07	5,603,729,684	0.13	12,166,906,544
2012	3,135,483,892,532	31.10	1,311,017,807,451	29.43	4,446,501,699,983
2013	10,660,998,785	0.11	8,426,108,378	0.19	19,087,107,163
2014	12,136,595,968	0.12	10,485,141,334	0.24	22,621,737,302
2015	14,136,908,713	0.14	13,055,464,250	0.29	27,192,372,963
2016	15,542,923,020	0.15	16,057,597,294	0.36	31,600,520,314
2017	14,103,897,954	0.14	17,029,069,579	0.38	31,132,967,533
2018	17,027,020,838	0.17	17,354,551,013	0.39	34,381,571,851
2019	6,849,240,869,338	67.94	3,049,359,200,548	68.46	9,898,600,069,886

Sumber: Sekunder, Tahun 2020

Dari Tabel 4 terlihat bahwa proporsi pengeluaran pemerintah melalui belanja tidak langsung sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 6,849,240,869,338 atau 67.94 %. Jika dilihat dari proporsi belanja daerah Propinsi Sulawesi Selatan melalui belanja tidak langsung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dari pengeluaran

pemerintah melalui proporsi belanja langsung sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 3,049,359,200,548 atau dengan presentasi 68.46 %, mengalami peningkatan yang signifikan di bandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 17,354,551,013 atau dengan presentasi 0.39 %.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi investasi melalui penerimaan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui dan menganalisis realisasi investasi melalui penerimaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2019.

TINJAUAN PUSTAKA
Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan - perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno dalam Dian, 2012).

Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk men-

ciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2004:65). Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan.

Tenaga Kerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, menyebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja demi menghasilkan barang atau jasa sehingga mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri atau masyarakat. Jadi, tenaga kerja adalah definisi umum yang mencakup penduduk yang punya kemampuan untuk bekerja atau berusia 15 tahun ke atas.

Tenaga kerja terdiri atas dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan

langsung atas jasa kerjanya (Badan Pusat Statistik, 2019).

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah

(Sukirno, 2005). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2011). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut ekonomi Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad dan Wicaksono, 2017). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga:

- a. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
- b. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
- c. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sector-sector dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 2011). Persamaannya adalah:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Keterangan:

- ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi
- ΔK = tingkat penambahan barang modal
- ΔL = tingkat penambahan tenaga kerja

ΔT = tingkat penambahan teknologi

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis yakni:

$$Y = Ae^{ut} \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$$

Keterangan:

- Y = Produk Domestik Bruto
- K = stok modal fisik dan modal manusia
- L = tenaga kerja non terampil
- A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar
- e^{ut} = melambangkan tingkat kemajuan teknologi
- α = melambangkan elastisitas output terhadap modal, yakni persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal manusia.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungandan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro dan D. Suindyah, 2011).

Hubungan Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi

dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan asumsi bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Hubungan Angkatan Kerja Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Nicholson W. dan Wicaksono (2017) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.

Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marginal (*Marginal Physical Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Mundle dan Rustiono (2010) berpendapat bahwa kemajuan teori dan studi empiris mengenai intervensi kebijakan publik dalam pengembangan manusia mencerminkan tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan sosial. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal

(Sukirno,2011) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan eksperimen. Menurut Sugiyono (2007: 11), yang dimaksud penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol gejala-gejala dari pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan.

Daerah dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Kantor Dinas Tenaga Kerja

Sulawesi Selatan, dan objek penelitiannya adalah pengaruh investasi yang tercermin dalam PMDN dan PMA, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Siyoto, 2015).
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan (Nazir, 2013).

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan variabel bebas data kuantitatif, dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X₁ = Investasi Melalui Penanaman Modal Asing (PMA)

X_2 = Investasi Melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

X_3 = Tenaga Kerja

X_4 = Pengeluaran/Belanja Pemerintah

α = nilai constanta

β = koefisien korelasi

ϵ = nilai standar error

Alat analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antar variabel investasi,

tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Sulawesi Selatan. Pengujian analisis menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier yang dimuat dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.

Analisis Regresi dengan Model Summary Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,748 ^a	0,560	0,208	5,50655

Sumber: Sekunder, Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi model summary pada tabel diatas. Menunjukkan bahwa R square (R^2) dengan nilai sebesar 0,560 mengandung arti bahwa secara bersama-sama variabel Penanaman Modal Asing (X_1), Penanaman Modal Dalam Negeri

(X_2), tenaga kerja (X_3), dan pengeluaran pemerintah (X_4) mempunyai pengaruh sebesar 56 persen terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), sedangkan sebesar 44 persen di pengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang dibentuk.

Tabel 5.

Analisis Regresi dengan Model Anova Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	193,132	4	48,283	1,592	0,000 ^b
Residual	151,610	5	30,322		
Total	344,742	9			

Sumber: *Data Diolah, Tahun 2020*

Dari hasil analisis regresi model anova pada tabel diatas dengan perhitungan F hitung menunjukkan angka sebesar 1,592, dengan signifikansi sebesar 0,000. Angka tersebut jauh lebih

kecil dari *level of significant* 5 persen. Ini berarti bahwa secara serempak variabel Penanaman Modal Asing (X_1), Penanaman Modal Dalam Negeri (X_2), tenaga kerja (X_3), dan pengeluaran

Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja,Andi Wahana

pemerintah (X_4) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Tabel 6.

Analisis Regresi *Coefficients Correlation* Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-45,176	24,724		-1,827	0,127
X1	0,684	0,459	0,555	1,490	0,001
X2	1,297	0,548	1,307	1,368	0,002
X3	0,091	0,089	0,330	1,020	0,005
X4	0,447	0,467	0,914	1,801	0,004

Sumber: Sekunder, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel PMA (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dilihat dari t hitung sebesar $1,490 < t$ tabel $1,812$ dengan signifikansi $0,001$ atau lebih kecil dari porsi 1 persen, artinya PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien korelasi antar variabel PMDN (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dilihat dari t hitung sebesar $1,368 < t$ tabel $1,812$ dengan signifikansi $0,002$ atau lebih kecil dari porsi 1 persen, artinya PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien korelasi antar variabel tenaga kerja (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dilihat dari t hitung sebesar $1,020 < t$ tabel $1,812$ dengan signifikansi $0,005$ atau lebih kecil dari porsi 1 persen, artinya tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien korelasi antar pengeluaran pemerintah (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dilihat dari t hitung sebesar $1,801 < t$ tabel $1,812$ dengan signifikansi $0,005$ atau lebih kecil dari porsi 1 persen, artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN
Pengaruh Investasi Melalui Penerimaan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien korelasi antar variabel PMA (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dilihat dari t hitung sebesar $1,490 < t$ tabel $1,812$ dengan signifikansi $0,001$ atau lebih kecil dari porsi 1 persen, artinya investasi melalui penerimaan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikuatkan penelitian terdahulu Sodik dan Nuryadin (2005) dan Rustiono (2008), hasil analisis menunjukkan bahwa PMA berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data realisasi investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 sampai 2019 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerimaan PMA akan berdampak pada peningkatan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya PMA di Propinsi Sulawesi Selatan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, me-ningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada kenyataannya, kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya tidak lepas dari peranan investasi melalui penerimaan PMA yang ditanamkan di wilayah tersebut yang pada akhirnya

berdampak pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Propinsi Sulawesi Selatan.

Pengaruh Investasi Melalui Penerimaan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai koefisien korelasi antar variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dilihat dari t hitung sebesar $1,368 < t$ tabel $1,812$ dengan signifikansi $0,002$ atau lebih kecil dari porsi 1 persen, artinya investasi melalui penerimaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berujuk pada data realisasi investasi melalui penerimaan PMDN Propinsi Sulawesi Selatan sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai 2019 menjelaskan bahwa setiap kenaikan penerimaan PMDN berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan. Semakin banyak pengusaha-pengusaha dalam negeri yang berinvestasi akan menambah pundi-pundi pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini pada

akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB Propinsi Sulawesi Selatan.

Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai koefisien korelasi antar variabel tenaga kerja (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dilihat dari t hitung sebesar $1,020 < t$ tabel $1,812$ dengan signifikansi $0,005$ atau lebih kecil dari porsi 1 persen, artinya tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data angkatan kerja di Propinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk bekerja sebanyak $3.830.096$ orang dengan persentase kerja $11,40\%$ mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2018 sebesar $3,774,924$ atau dengan presentasi 11.23% . Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lulusan SMP ke bawah paling banyak mengisi lapangan usaha pertanian. Untuk tingkat pengangguran di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sebanyak $200,304$ orang atau dengan presentasi $9,91\%$, kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan manusia di Propinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomian di Propinsi Sulawesi Selatan.

Pengaruh dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian di Propinsi Sulawesi Selatan dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai koefisien korelasi antar pengeluaran pemerintah (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dilihat dari t hitung sebesar $1,801 < t$ tabel $1,812$ dengan signifikansi $0,005$ atau lebih kecil dari porsi 1 persen, artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikuatkan dengan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryono, (2010), Novianto (2012), Maulana (2013) dengan hasil analisis menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat dari pengeluaran pemerintah melalui proporsi belanja tidak langsung sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp $6,849,240,869,338$ atau 67.94% . Jika dilihat dari proporsi belanja daerah Propinsi Sulawesi Selatan melalui belanja tidak langsung dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah melalui proporsi belanja langsung sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 3,049,359,200,548 atau dengan presentasi 68.46%, mengalami peningkatan yang signifikan di bandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 17,354,551,013 atau dengan presentasi 0.39 %. Artinya, semakin tinggi belanja pemerintah akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan publik, berdampak pada kurangnya ketimpangan sosial, masyarakat semakin sejahtera, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier model kuantitatif menunjukkan bahwa:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Penanaman tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan.

4. Penanaman pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan.

Saran

Dari kesimpulan diatas maka saran dalam penulisan ini bagi pemerintah daerah terlebih khusus pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Terus memberikan inovasi terbaru bagi perusahaan asing dalam melakukan penanaman modal di propinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya PMA dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha dalam negeri dalam melakukan penanaman modal dalam negeri, agar masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan

- pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.
3. Untuk menurunkan tenaga kerja, pemerintah diharapkan membuka lapangan-lapangan kerja baru dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha luar dan dalam negeri dalam berinvestasi, dengan demikian akan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
 4. Pemerintah diharapkan dapat mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan. Melalui anggaran rutin, khususnya belanja rutin pegawai yang berupa gaji pegawai, pemerintah dapat mendorong perekonomian melalui konsumsi masyarakat.

REFERENSI

BPS Sul-Sel, 2011. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2011*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

-----, 2012. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2012*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

-----, 2013. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun*

2013. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

-----, 2014. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

-----, 2015. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2015*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

-----, 2016. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2016*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

-----, 2017. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2017*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

-----, 2018. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2018*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

-----, 2019. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

-----, 2020. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

Dian, Rundu Sonda Elsy. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang

Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja,Andi Wahana

- Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1995-2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Fauzan, Alfian Wahyu. 2015. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Utama, Suryana Made. 2016. Aplikasi Analisis Kuantitatif Untuk Ekonomi dan Bisnis. Penerbit: CV. Sastra Utama. Denpasar.
- Rustiono, Deddy. 2010. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi, UNDIP. Semarang.
- Sari, Mutia. 2016. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka.
- , 2005. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. LPFEUI Jakarta.
- Suryana, 2010. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama.
- Todaro, Michael. 2010. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan.
- Rostow. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.
- Utama, S. Made. 2016. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Penerbit CV. Sastra Utama, Denpasar.
- Wicaksono, Alfarendi. 2017. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 1996-2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun

Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja,Andi Wahana

- | | |
|--|--|
| 1970 tentang Penanaman
Modal Asing (PMA). | Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 Tentang
Ketenagakerjaan. |
| Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 tahun
1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri
(PMDN). | Undang-undang Republik
Indonesia No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman
Modal |